

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

- Dahwal S, 2016, *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Dahwal S, 2017, *Perbandingan Hukum Perkawinan*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Harahap Y, 1975, *Hukum Perkawinan Nasional*, Zahir Trading, Medan.
- Mertokusumo S, 2021, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Muhammad A, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- O.S. EOH, 1996, *Perkawinan Antar Agama: Dalam Teori dan Praktek*, Srigunting, Jakarta.
- Purwaharsanto, 1992, *Perkawinan Campuran Antar Agama Menurut UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: Sebuah Telaah Kritis*, Aktualita Media Cetak, Yogyakarta.
- Saleh W, 1980, *Hukum Perkawinan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sastroatmojo A, 1978, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Soemiyati, 1982, *Hukum Perkawinan Islam dan UUP*, Liberty, Yogyakarta.
- Suma A.M, 2015, *Kawin Beda Agama di Indonesia: Telaah Svariah dan Qanuniah*, Lentera Hati, Tangerang.
- Syahrani R, 2006, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, PT. Alumni, Banjarmasin.

Usman S, 1995, *Perkawinan Antar Agama dan Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sudara, Serang.

Waluyo B, 1996, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Wiradipradja S,E, 2015, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Keni Media, Bandung.

2. ARTIKEL JURNAL

Corinsadi Khoira Azzahra, Nurul Hikmah, “Analisis Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr tentang Perizinan Pencatatan Perkawinan Beda Agama”, *Indonesian Journal of Contemporary Law*, Vol. 3, No. 3, 2026.

David Tan, *Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum*, Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Volume 8, Nomor 8, 2021.

Detto Kharisma Rovanno, Aris Munandar, Diangsa Wagian, *Analisis Yuridis Pengesahan Perkawinan Beda Agama dalam Putusan Nomor 916/PDT.P/2022/PN.SBY*, Private Law, Volume 3, Nomor 2, 2023.

Hartini Dwi Utami, I Ketut Oka Setiawan, *Kajian Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 333/Pdt.P/2018/PN.Skt)*, Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan, Volume 1, Nomor 2, Juni 2022.

Herdi Munte, Christo Sumurung Tua Sagala, *Perlindungan Hak Konstitusional di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Volume 8, Nomor 2, 2021.

Muhammad Assegaf, Dominikus Rato, Moh. Ali, “Keabsahan Perkawinan Beda Agama Pasca Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023: Studi Kasus Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr”, *Acten Journal Law Review*, Vol. 1, No. 2, 2024.

Prasetyo Ade Witoko Ambar Budhisulistiyawati, *Penyelundupan Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia*, Journal UNS, Volume 7, Nomor 2, 2019.

Sarah Azzura Harahap, Tri Lisiani Prihatinah, dan Haedah Faradz, “Penetapan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Pasca Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023: Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr”, *Soedirman Law Review*, Vol. 6, No. 2, 2024..

Shamad, M. Y., *Hukum Pernikahan dalam Islam*, Istiqra', Volume 5, 2017.

Shofiatul Jannah, Nur Syam, Sudirman Hasan, *Urgensi Pencatatan Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman, Volume 8, Nomor 2, 2021.

Yunanto, *Perkawinan dalam Perspektif Hukum dan Agama (Kajian atas Jiwa Religius UUP dan Praktik Perkawinan Campuran Interreligius)*, Diponegoro Private Law Review, Volume 1, Nomor 1, 2017.

3. PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019.

UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674. UU ini mengatur reformasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, penggunaan NIK tunggal, serta perlindungan data pribadi penduduk untuk pelayanan publik.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 423/Pdt.P/2023/PN JKT.Utr

4. PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Negeri Jakarta Putusa Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr